

Prof. Dary Firdausy, S.P.

PANCASILA

SUATU ORIENTASI SINGKAT



AN
S NEGERI

5

R



dilengkapi dengan :

Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan PANCASILA

(KETETAPAN MPP No. II/MPP/1978)



GENEKBIT

ARIES LIMA

Prof. Darji Darmodiharjo, SH

PANCASILA

SUATU ORIENTASI SINGKAT

MILIK PERPUSTAKAAN
IKIP MALANG

dilengkapi dengan :

Pedoman Penghayatan dan

Pengamalan PANCASILA

(KETETAPAN MPR No. II/MPR/1978)



PENERBIT

ARIES LIMA JAKARTA



Jenderal T.N.I. Purnawirawan SOEHARTO
Presiden Republik Indonesia terpilih
periode 1983 – 1988



Jenderal T.N.I. Purnawirawan UMAR WIRAHADIKUSUMAH
Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih
periode 1983 – 1988



**GARUDA PANCASILA
LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

WARNA :

Seluruh burung garuda, bintang, kapas, padi dan rantai	kuning emas
Ruangan perisai di tengah-tengah (kiri atas dan kanan bawah: merah; kanan atas dan kiri bawah :	merah-putih
Dasar bintang yang berbentuk perisai	putih)
Kepala Banteng	hitam
Pohon beringin	hitam
Pita	hijau
Huruf	putih
	hitam

JUMLAH HELAI BULU :

Pada tiap-tiap sayap	17
Pada ekor	8
Kecil di bawah perisai	19
Kecil di leher	45

Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan*

*Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat
Indonesia*



".....saya mengajak masyarakat luas..... untuk memikirkan dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Indonesia." (Pidato Kenegaraan, 16-8-1975)

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memahami Pancasila secara singkat dan komprehensif, dalam buku ini kami coba memberikan sekeedar uraian yang berisi orientasi umum mengenai pokok-pokok pengertian dan aspek-aspek Pancasila dalam kehidupan ber-negara, berbangsa dan bermasyarakat.

Kami menyadari tulisan ini masih kurang sempurna dan kurang mendalam, justru karena demikian luas dan dalamnya isi Pancasila termaksud di atas, namun kami mencoba menyajikannya dengan maksud untuk memberikan gambaran secara singkat dan secara garis besar tetapi menyeluruh.

Demikianlah, semoga ada juga manfaatnya.

Malang, 11 Maret 1974

Darji Darmodiharjo

CATATAN PADA CETAKAN KEEMPAT

Pada cetakan keempat ini diadakan beberapa penambahan untuk menyempurnakan isi buku, sehingga jika dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya agak banyak mengalami perubahan. Meskipun demikian, prinsip pengertian yang terdapat di dalamnya tidaklah berbeda.

Malang, 2 Mei 1976

Darji Darmodiharjo

CATATAN PADA CETAKAN KELIMA

Pada cetakan kelima ini terdapat beberapa tambahan/penyempurnaan.

Malang, 2 Mei 1977

Darji Darmodiharjo

CATATAN PADA CETAKAN KETUJUH

Pada cetakan ketujuh ini isi bagian IX Pancasila dan Pembangunan Nasional telah disesuaikan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978. Di samping itu dilengkapi pula dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Kepada Sdr. Drs. C.S.T. Kansil, SH, yang menyuntingkan dan mengusahakan penerbitannya oleh PN Balai Pustaka di Jakarta, kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 2 Mei 1978

Darji Darmodiharjo

CATATAN PADA CETAKAN KESEMBILAN

Pada cetakan kesembilan ini diadakan penyempurnaan skema dan beberapa bagian isi.

Kepada Ibu Dra. S.H. Adam Saleh, Bapak J. Dunga, Sdri. Dra. Lisna Marwani dan Sdr. Dwi Suwarno yang banyak membantu dalam perbaikan buku ini, diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Jakarta, 17 Desember 1982

Darji Darmadiharjo

CATATAN PADA CETAKAN KESEBELAS

Pada cetakan kesebelas ini diadakan beberapa perbaikan salah cetak dan penyesuaian dengan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1983, dan juga saran-saran dari masyarakat.

Untuk ini semua diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Jakarta, 17 Desember 1983

Darji Darmodiharjo

KATA SAMBUTAN

1. Bapak Darji Darmodiharjo, SH, Rektor Universitas Brawijaya di Malang yang bertahun-tahun telah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Pancasila IKIP Malang dalam menyusun sebuah karangan yang diberi judul "Pancasila Suatu Orientasi Singkat" telah meminta saya untuk membubuhi Kata Sambutan sebagai pengantar karangannya itu dalam rangka Orientasi Pancasila sekarang ini.

2. Pada hemat kami sebuah pengantar dari tangan saya, kalau itu dimaksud sebagai suatu anjuran untuk perlunya diketahui isi karangan Bapak Darji Darmodiharjo itu dalam kalangan yang lebih luas, maka menurut penglihatan saya nama pengarang dan pengalamannya dalam bidang pembinaan Pancasila selama ini sudah cukup memberi jaminan yang positif.

3. Hanya inginlah saya menggarisbawahi pentingnya sepuluh materi pokok yang dikemukakan Pengarang agar menjadi pegangan pertama bagi kita semua yang dengan kesadaran ingin memahami arti Pancasila kita itu, baik sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia maupun sebagai pedoman Hidup Bangsa kita yang langsung tergalil dari kepribadiannya melalui terutama sejarah perjuangan Bangsa menjadi Bangsa yang merdeka dan berdaulat.

4. Dalam pada itu inginlah saya menekankan, bahwa tugas penghayatan dan Pembinaan Pancasila itu sebagai sumber tertib hukum Indonesia adalah terletak di tangan kita semua sebagai Bangsa yang berbudi luhur dan berkebudayaan tinggi. Namun demikian secara organisatoris kenegaraan usaha nasional yang sepenting itu karena merupakan sarana untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional, perlu diatur dan dilengkapi dengan suatu susunan aparatatur serta mekanisme yang tangguh dan berkemampuan tinggi dari pusat hingga daerah kecil sekalipun.

5. Perlulah kiranya diperhatikan perkembangan baru di bidang pelaksanaan pokok-pokok pemikiran tentang Demokrasi Pancasila khusus di Daerah-daerah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. IV Tahun 1973) seperti diuraikan lebih lanjut dalam REPELITA ke II, yaitu pokok-pokok asas tentang pemberian otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab melalui asas desentralisasi bersama-sama dengan dekonsentrasi, yang menghasilkan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif yang dapat melaksanakan tugas pemerintahan di daerah secara serasi yang didasarkan terutama pada hasil guna dan daya-guna penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

6. Dengan harapan yang besar, bahwa pengertian dan pemahaman tentang Pancasila kita itu akan segera dapat ditingkatkan di segala bidang pembangunan dan melalui sarana pendidikan, baik yang formal maupun non formal, maka kami mengucapkan selamat bagi semua pembaca yang bersama saya sendiri merasa pentingnya permasalahan untuk ditingkatkan ruang lingkupnya sampai dapat menjiwai seluruh masyarakat kita bersama.



27 Maret 1974

Surabaya, _____

14 Januari 1975

Salam,

Prof. K. Purbopranoto, SH.

Ketua Team Pancasila UNAIR

PENDAHULUAN

Bagi manusia yang sadar dan normal, segala aktivitas, tingkah laku dan perbuatannya tentu mempunyai maksud atau tujuan dan cita tertentu. Demikian pula apabila ia ingin mengadakan, merumuskan dan menciptakan sesuatu, tentu mempunyai dan disertai dengan maksud/tujuan/cita tertentu. Begitu juga halnya dengan bangsa Indonesia mengadakan/merumuskan Pancasila itu. Apakah maksud dan tujuan bangsa Indonesia mengadakan/merumuskan Pancasila?

Jawab atas pertanyaan itu akan diberikan dalam Pendahuluan ini, sebelum kita masuki pembicaraan berikutnya, agar dengan demikian kita dapat melihat dan menempatkan Pancasila itu pada proporsi yang sebenarnya.

Menurut sejarahnya, Pancasila diadakan atau dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai DASAR NEGARA Indonesia Merdeka (Republik Indonesia).

Bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Chosakai) tanggal 29 Mei 1945, Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang Dokuritsu Junbi Chosakai mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (philosophische grondslag dari Indonesia Merdeka).
2. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut: "Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar (garis bawah dari penulis) dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun, . . ." (Naskah Persiapan UUD 1945 jilid I halaman 88).